

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILKAUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)**



OLEH :

CAKRA NURYADI

B 111 126 63

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2017

HALAMAN JUDUL

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)**

OLEH :

CAKRA NURYADI

B 111 126 63

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana**

Departemen Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)

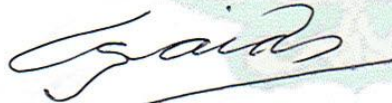
Disusun dan diajukan oleh

**CAKRA NURYADI
B111 12 663**

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2017
Dan dinyatakan Lulus

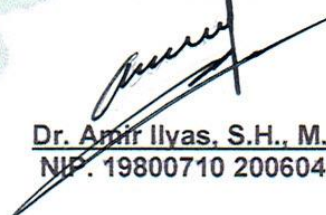
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : CAKRA NURYADI
Nomor Induk : B 111 12 663
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILKAUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Nopember 2017

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH.MH.,M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: CAKRA NURYADI
Nomor Pokok	: B11112663
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Cakra Nuryadi (B11112663), Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus di wilayah hukum polsek Ujung Pandang) dibimbing oleh Said Karim Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang dan kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi. Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran orang tua atau pihak korban terkait mengenai diversi, serta lemahnya bantuan hukum yang dilakukan pengacara dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversi.

Saran penulis adalah perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di setiap polsek di Kota Makassar agar setiap perkara yang melibatkan anak nakal tidak terpusat pada Polrestabes saja, melainkan Polsek juga dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan diversi. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan diversi ini harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran terhadap advokat dan badan pemasyarakatan agar bertindak sepenuh hati dalam membantu kepolisian mengupayakan diversi pada perkara tindak pidana yang dilakukan anak nakal.

Kata Kunci: Penyidikan, Penganiayaan, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nyalah yang telah memberikan kehidupan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak” yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih. Terlebih kepada Kedua Orang Tuaku, **H. Abd. Rahman** dan **Hj. Indo Takko** yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penulis sampai menyelesaikan studi Penulis. Dan untuk Istriku tercinta **Ariani** Beserta ketiga Anakku **Aurel Cipta Haerani**, **Zhaqilah Reski Ramadhani**, dan **Gilang Alamsyah Putra** yang selama ini memberi semangat kepada penulis, Juga kepada seluruh keluarga besar Dikmaba Polri Angkatan

21 Tahun 2002 TTNT ASADE yang tak henti mendukung dan mendoakan penulis.

Serta Kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries tina Pulubuha, MA Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim SH., MH. Dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH. , Hj. Haerana SH., MH. , Dr. Hj. Nur Azisa, SH., MH. Selaku penguji penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Kepala Kepolisian Sektor Ujung Pandang, Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang** yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Teman KKN Gelombang 94 Univesitas Hasanuddin Makassar Kecamatan Tamalanrea, Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Makassar.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen pada bagian Pidana

9. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.

Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Wassalam dan Terima Kasih.

Penulis,

Cakra Nuryadi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Pengertian Anak	15
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Anak	25
D. Tindak Pidana Penganiayaan	31
E. Penyidikan Tindak Pidana	33

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Analisis Data	47

BAB VI: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang	48
B. Kendala Yang Menghambat Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang	56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan kehidupan semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak dimana anak yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat tidak mungkin terpisah dari pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya dan oleh karena adanya interaksi dengan masyarakat tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik. Tidak terkecuali konflik yang di dalamnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat.

Dari berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban dari pergulatan kehidupan masyarakat yang heterogen. Diantaranya adalah membentuk seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis normatif, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan

Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang dewasa dan tempat penahanannyapun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.

Seiring dengan kemajuan masyarakat maka kejahatanpun semakin canggih dan semakin bervariasi modus operandi-nya yang terkadang belum ditemukan aturan hukumnya sehingga dapat dikatakan ibarat orang sedang berlari, hukum seperti terengah-engah atau bahkan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman dan terkadang apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu lagi memback up perbuatan melawan hukum tertentu

sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan pengaturan khusus terhadap perbuatan dimaksud.

Sebagai contoh, telah diaturnya secara khusus tentang perlindungan anak dalam Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam undang-undang tersebut telah diatur pula perihal ancaman pidana terhadap tindak pidana tertentu yang ancaman pidananya jauh lebih berat daripada tindak pidana sama yang diatur dalam KUHP. Pertanyaan selanjutnya yang dapat diajukan yaitu bagaimana jika tindak pidana yang telah diatur ancamannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur atau dengan kata lain, jika antara pelaku dan korbannya juga sama-sama masih anak maka yang menyatakan bahwa oleh karena di samping melakukan tindak pidana ternyata terdakwa juga masih anak-anak yang patut pula diberikan perlindungan dan seorang anak tentunya tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak maka ketentuan dalam pasal-pasal Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa anak dimaksud.

Pendapat tersebut sangat dapat diterima dan patut pula diberikan apresiasi dengan mengingat maksud dan tujuannya yang semata-mata demi melindungi kepentingan anak yang sedang terjerat masalah hukum karena meskipun yang bersangkutan sebagai pelaku tapi pada dasarnya anak tersebut juga adalah korban dari lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembangnya baik dari keluarga ataupun lingkungan masyarakatnya sehingga perlu pula mendapatkan perlindungan.

Namun apabila dikaji dari sisi formalitas pengajuan suatu perkara maka adalah menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk mengajukan dan menerapkan pasal apa yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa dalam menyusun surat dakwaannya. Surat dakwaan memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak kurang atau tidak lebih. Oleh karena demikian, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestaio*.¹

Dalam persidangan, surat dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan dokumen tersebut yang menentukan batas-batas pemeriksaan dan dalam putusan

¹ Djoko Prakoso. 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta. Hal. 41.

hakim, hanya boleh diambil putusan tentang perbuatan-perbuatan yang telah terpahat dalam surat tersebut atas dasar alat bukti yang diperoleh di muka persidangan dan hakim itu yakin akan kesalahan terdakwa.

Salah satu tindak pidana yang cukup sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana penganiayaan. Perkelahian individu maupun perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan luka-luka sangat sering terjadi di wilayah hukum polsek ujung pandang. Hal ini merupakan dampak dari kebebasan anak dalam pergaulan atau bahkan kesalahan dalam bergaul di masyarakat. Terkadang, perkelahian antar kelompok pemuda di wilayah hukum ini juga banyak melibatkan anak-anak, bahkan anak di bawah umur sekalipun. Tentunya dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak tersebut, pihak kepolisian diharuskan untuk menerapkan diiversi, dimana penyelesaian non-litigasi harus dikedepankan. Namun di satu sisi lagi, anak-anak sebagai saksi dalam tindak pidana sangat membantu pihak kepolisian dalam membuat terang suatu peristiwa hukum, mengingat bahwa anak-anak cenderung berkata jujur dan apa adanya saat ditanya pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, perlu ditekankan bahwa rangkaian penindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan antara orang dewasa dan anak-anak

menggunakan proses yang berbeda. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang baik oleh aparat penegak hukum khususnya yang menangani permasalahan kenakalan anak dan remaja terkait mengenai urgensi perlindungan anak yang sedang berhadapan hukum agar tidak mencederai perlindungan ham anak dalam upaya menerapkan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang?
2. Kendala apakah yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :²

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu :³

a. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons tindak pidana adalah :⁴

² Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

³ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 31-32.

⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 185

"tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa "kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :⁶

⁵ Ibid.,

⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 250.

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.”

Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.⁷

Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.⁸

Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.⁹

Van Hammel yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa:¹⁰

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”

b. Pandangan Dualistis

⁷ Op. Cit., Sudarto, Hlm. 31-32.

⁸ Ibid.,

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 55.

¹⁰ Op.cit. Andi Zainal Abidin. Hlm. 250.

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis , yaitu :¹¹

“dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.”

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :¹²

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “*feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

¹¹ Ibid.

¹² Op. Cit. Sudarto. Hlm 31-32.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:¹³

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁴

Berdasarkan definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:¹⁵

“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan

¹³ Ibid.

¹⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

¹⁵ Op. Cit. Soedarto, Hlm. 31-32.

apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.

B. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁶ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum.

Pengertian anak dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, sehingga akan ditemui batasan seseorang disebut sebagai “anak” menjadi sangat beragam. Misalnya dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1. Anak dalam Perspektif Psikologi

Perspektif psikologis melihat manusia lebih menyeluruh, dalam arti manusia dilihat dari beberapa sudut, seperti; usia, kejiwaan, dan pertumbuhan. Dalam perspektif psikologi manusia dibagi dalam beberapa periode, yaitu:¹⁶

¹⁶ Kartono, Kartini 1994. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hal. 61.

a) Periode Vital (masa bayi 0-2 tahun)

Masa bayi disebut sebagai periode vital karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu, peranannya sangat vital dan penting. Proses pertumbuhan bayi berlangsung dengan cepat dan hampir semua kegiatannya tampak seperti mekanisme otomatis, bagaikan refleks-refleks yang tidak disadari dan tidak terkoordinasi. Kemudian lambat laun gerak-geraknya yang terus menerus dipelajari itu menjadi semakin teratur, terkontrol, dan terkoordinasi oleh akal dan kemauannya.

Pada fase perkembangan selanjutnya akan timbul lebih banyak reaksi-reaksi yang negatif yaitu berupa gerakan menjauhi atau menghindari stimulasi, antara lain: gerakan menolak, mundur terkejut, tangis, sedu-sedan, memberengut, mengkerutkan dahi, merengek-renek, surut takut, menolak dan menjauhi orang dewasa.

Hal tersebut disebabkan karena bayi belum mampu membiasakan diri terhadap macam-macam perangsang dari luar (lingkungan). Belum mampu mengolah stimulasi dari luar dengan pengertiannya. Baru pada akhir tahun pertama, dengan semakin berkembangnya akal-budi, maka reaksi-reaksi negatif tadi makin berkurang dan diganti dengan reaksi-reaksi yang positif yaitu dapat berwujud gerak menuju stimulasi atau perangsang. Hal ini antara lain berupa: mendengarkan, meraih, menjangkau, memegang,

senyum, ketawa, mendekati orang dewasa (dengan menggulingkan tubuh atau merangkak), merasa gembira, dan lain sebagainya.

b) Periode Estetis (masa kanak-kanak 1-5 tahun)

Pada periode ini anak dengan cepat mengenal lingkungan tempat tinggalnya, namun pengenalan tersebut serba tidak lengkap dan belum terinci. Walaupun pengertian dan pengenalannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas atau usaha orang dewasa, namun dibatasi oleh rasa “belum sadar”. Sehingga ia melihat lingkungan dengan pandangan yang sederhana. Pengamatan ini disebut *Complex-Qualita*, artinya pengamatannya merupakan satu totalitas, sebab anak belum bisa membedakan bagian-bagian detailnya.

Menurut William Stern,¹⁰ kemampuan pengenalan bayi dan anak-anak adalah:

- a. Mula-mula anak bisa hidup dalam milieu (lingkungan) yang sangat sempit, yaitu dibatasi oleh kebesaran atau sosok badan sendiri. Fase ini disebutnya sebagai *Urraum* (ruang-lingkup asal);
- b. Sesudah beberapa minggu usianya, ruang lingkup ini meluas sampai lingkungan yang lebih dekat. Fase ini disebut sebagai *Nahraum* (ruang-lingkup dekat);
- c. Sesudah beberapa bulan kemudian, ruang-lingkup tersebut lebih melebar luas sampai pada lingkungan yang jauh. Fase ini disebut sebagai *Fernraum* (ruang-lingkup jauh);

c) Periode Intelektual (masa anak-anak sekolah dasar 6-12 tahun)

Pada periode ini sikap anak terhadap kenyataan faktual bercorak sangat subyektif. Lambat laun gambaran yang diperoleh tentang alam nyata akan makin bertambah sempurna dan makin obyektif. Mengingat perkembangan anak yang amat pesat pada usia sekolah, dan lingkungan keluarga tidak lagi mampu memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman, maka anak memerlukan suatu lingkungan sosial baru yang lebih luas.

Hal ini berupa sekolah untuk mengembangkan semua potensinya. Lingkungan sekolah akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada anak sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sampai pada usia 3,5 tahun anak berada dalam pengaruh keluarga seutuhnya. Sesudah umur tersebut ia mulai meluaskan cakrawala pengalamannya di luar lingkungan keluarga. Fungsi penghayatan emosional yang dominan sampai usia 3,5 tahun, lalu berangsur-angsur dengan penghayatan yang lebih rasional, sehingga semakin obyektif.

Kemudian memasuki usia sekolah, sikap hidup yang egosentris di ganti dengan sikap yang *zakelijk*, obyektif, dan empiris berdasarkan pengalaman.¹¹ Hubungan antara benda-benda dengan diri sendiri tidak lagi berdasarkan pada penghayatan yang subyektif, tetapi berubah menjadi pengamatan yang obyektif. Dengan begitu anak mulai

menguasai dunia sekitar secara obyektif, sehingga dapat berbaur ke dalam masyarakat luas yaitu masyarakat di luar keluarga, taman kanak-kanak, sekolah, dan kelompok sosial lainnya.

Pikiran anak pada usia sekolah dasar berkembang secara berangsur-angsur dan tenang. Anak ada dalam stadium belajar, selain keluarga, sekolah memberikan pengaruh sistematis terhadap pembentukan akal budi anak. Pengetahuannya bertambah secara pesat, dan minatnya tercurah pada segala sesuatu yang dinamis, ini sangat berguna dalam pengembangan kepribadiannya.

d) Periode *Pueral* (masa pra-pubertas 12-14 tahun)

Masa pueral atau pra-pubertas ini ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang besar. Untuk menentukan dengan tegas dan pasti tentang batasan usia masa pueral ini dimulai dan berakhirnya, ada ahli yang menentukan usia 10-12 tahun, ada yang menentukan 12-14 tahun, namun yang bisa dinyatakan, bahwa gejala-gejala pueral ini bisa berkelanjutan sampai jauh melampaui masa pubertas sebenarnya.¹³ Ini diperlihatkan dengan tingkah laku anak yang kelihatan kasar, canggung, berandalan, kurang sopan, liar dan lain-lain. Bersamaan dengan pertumbuhan badan yang pesat, berlangsung juga perkembangan intelektual yang intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar.

Pada akhir periode *pueral* ini timbul kecenderungan-kecenderungan untuk menentang dan memberontak, yang didorong oleh perasaan hidup positif, kuat, dan kesadaran anak. Periode ini disebut juga sebagai masa menantang atau *trotzaller* kedua. Adapun karakteristik anak pada masa menantang atau *trotzaller* ini adalah dengan ekspresi-ekspresi khas, seperti suka mogok, tidak patuh (*angehoorzaam*), keras kepala, suka protes, melancarkan banyak kritik, sombong merasa sudah dewasa, acuh tak acuh, sembrono, agresif, cepat marah dan besar mulut.

e) Periode Pubertas Awal (masa pubertas awal 14-17 tahun)

Kepribadian anak di masa pra-pubertas pada intinya masih bersifat kekank-kanakan, bahkan masa pubertas masih banyak terdapat unsur kekanak-kanakan. Namun pada usia pubertas ini muncul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan batiniahnya. Anak mulai menemukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis.

Masa pubertas awal atau masa pubertas merupakan periode tergugahnya kepribadian anak. Masa pubertas ini juga merupakan masa rekonstruksi. Dengan timbulnya kepercayaan diri, timbul pula kesanggupan menilai kembali tingkah laku yang dianggap tidak bermanfaat, digantikan dengan aktivitas yang lebih bernilai.

f) Periode *Adolesensi* (pasca-remaja)

Masa pubertas akhir (*adolesensi*) oleh Sigmud Freud disebut edisi kedua dari situasi *oedipus*, sebab relasi anak muda pada usia ini masih mengandung banyak unsur yang rumit dan belum terselesaikan, yaitu ada banyak konflik antara isi psikis dan kontradiktif, terutama konflik pada relasi anak muda dengan orang tua dan obyek cintanya.

Pada masa *adolesensi* ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur dan merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Pada periode ini banyak melakukan introspeksi (mawas diri) dan merenungi diri sendiri yang mana mampu menemukan keseimbangan dan keselarasan baru antara sikap ke dalam diri sendiri dengan sikap keluar ke dunia obyektif.

2. Anak dalam Perspektif Sosiologis

Perspektif kemasyarakatan melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, akan tetapi kehidupan atau pergaulannya di masyarakat. Dalam hukum adat, kriteria yang dipakai bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soepomo (1997:25) yaitu:

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri);

- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Menurut hukum adat, seseorang dapat dikatakan dewasa dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar (1997:18) bahwa:

“Orang yang sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertunya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.”

Dengan demikian, perspektif sosiologis memandang anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuan seseorang dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatannya. Dalam hukum adat pun melihat anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuannya (dapat bekerja) untuk memenuhi kependingan dan keluarganya.

3. Anak dalam Perspektif Yuridis

Lahirnya seorang bayi secara hukum akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata akibat hukum ini berpangkal dari hak dan kewajiban, seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak dan penyangkalan sahnyanya, perwalian, pendewasaan, pengangkatan anak dan lain-lain. Dari sudut hukum pidana sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pengertian anak menurut hukum

dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga akan ditemui batasan-batasan tertentu dalam memandang anak. Berikut ini adalah beberapa defines anak berdasarkan ketentuan undang-undang:

Sekarang, dapat dilihat dan dipelajari banyaknya pendefinisian kata anak yang berbeda-beda unsur dan sumbernya, antara lain :

1. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah yang berumur di bawah 16 tahun. Sedangkan ditinjau dari batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295, maka anak adalah yang berumur kurang dari 15 tahun. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka peraturan dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi.
2. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stbd 1874 Nomor : 23) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini juga sejalan dengan definisi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah.

4. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
5. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
6. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

C. Prinsip Perlindungan Hukum Anak

Secara etimologi, pengertian perlindungan hak anak dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan kata “hak anak”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan

buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak. Ada beberapa peraturan yang sejalan dengan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Di antaranya Pasal 100 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Lebih lanjut Pasal 186 KHI juga menyebutkan "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*"

Pasal-pasal ini dijadikan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak. Selama dalam pengasuhan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan

bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Arif Gosita, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Empat prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu mengatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan:

1. Non Diskriminasi

Setiap manusia tanpa kecuali anak, mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti diperbolehkan melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua maupun hal lainnya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak seperti misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang kepentingan atau bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri.

4. Menghargai pandangan anak

Prinsip keempat ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi serta pelaksanaan keseluruhan isi konvensi. Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi

kehidupan dan perkembangan anak. Terhadap prinsip ini Komite Hak Anak PBB merekomendasikan agar Indonesia mengembangkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik atas hak partisipatif anak, khususnya ditingkat lokal dan dimasyarakat tradisional serta mendorong penghormatan atas pandangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam sistem perawatan, administratif dan peradilan.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan kepada anak haruslah dipenuhi oleh negara, tentu saja termasuk keluarga dan masyarakat luas. Secara garis besar, hak-hak anak menurut Harkristuti Harkriswono (1999) dapat digolongkan :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*rights to survival*)
2. Hak untuk berkembang (*rights to development*)
3. Hak atas perlindungan (*rights to protection*)
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (*rights to participation*).

Hak atas kelangsungan hidup termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh

sakit. Hak untuk berkembang termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya juga hak asasi untuk anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Hak perlindungan termasuk didalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Hak berpartisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, orang dewasa khususnya orang tua yang seharusnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan

tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.¹⁷

2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁸

3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

E. Penyidikan Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHP. Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan

adalah:¹⁹

“Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan

¹⁹ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 36

berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

2) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

3) pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:

- (1) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- (3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

- (4) Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- (5) efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
- (6) Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan:
 - a. hak tersangka sesuai KUHAP;
 - b. hak pelapor dan pengadu;
 - c. hak saksi korban;
 - d. hak asasi manusia;
 - e. azas persamaan dimuka hukum;
 - f. azas praduga tak bersalah;
 - g. azas legalitas;
 - h. azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang – undang lain;
 - i. memperhatikan etika profesi Kepolisian

Pasal dalam SOP tersebut mendeskripsikan kewajiban seorang penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik dengan melihat azas penugasan serta mengedepankan hak dari seseorang yang dijadikan subyek dari pemeriksaan penyidikan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penyidikan. Disamping itu

dalam menjalankan tugas perpolisiannya, seorang Polisi selaku aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dan professional dalam melaksanakan pemeriksaan juga diatur dalam Perkaba SOP tersebut, yakni:

- 1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, penyidik memperhatikan norma hukum, antara lain:
 - b. etis, humanis, dan memegang prinsip etika profesi penyidikan;
 - c. hak dan kewajiban hukum bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka);
 - d. berdasarkan fakta hukum;
- 2) Kegiatan pemeriksaan meliputi:
 - a. pemeriksaan saksi;
 - b. pemeriksaan ahli;
 - c. pemeriksaan tersangka;
 - d. pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat;
 - e. pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dsb;
- 3) Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik membuat rencana pemeriksaan;
- 4) Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam kasus tertentu;
- 5) Untuk menghindari penyimpangan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan;

- 6) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ahli, Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat, Pemeriksaan alat bukti digital tercantum dalam lampiran “...” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Menurut isi Pasal 7 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 tersebutlah kinerja seorang penyidik Kepolisian di atur secara *rigid* dan *detail*, sehingga seorang Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum (*Law Enforcement*) dituntut harus senantiasa bersikap lebih etis, humanis dan lebih memegang etika profesi Kepolisian serta lebih mengedepankan hak dan kewajiban bagi pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi dari Sub Sistem Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan di masyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk kewenangan-kewenangan sendiri-sendiri serta bersifat koordinasi antara satu dengan yang lain. Oleh Ratnaningsing dalam penelitian skripsinya dijelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, yakni;

Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan

agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Ratnaningsih, 2006:16).

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System*. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan sebagai sub-sistem (komponen)

yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (*Legal Substance*), “struktur hukum” (*Legal Structure*), dan “budaya hukum” (*Legal Culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/ penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan perundang-undangan (komponen substantif/ normatif), lembaga/ struktur/ aparat penegak hukum (komponen struktural/ institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai “budaya hukum” (*Legal Culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/ sikap perilaku hukum/ perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum.²⁰

Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan (SPH) dapat dilihat berbagai aspek :

- 1) Dilihat dari aspek/ komponen substansi hukum (*Legal Substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan satu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/ sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan “*integrated legal system*” atau “*integrated legal substance*”.

²⁰ Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan. Jakarta : Kencana. Hlm. 17

2) Dilihat dari aspek/ komponen struktur (*Legal Structure*) sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/ lembaga/ aparat penegak hukum dalam melaksanakan, menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga merupakan “sistem administrasi/ penyelenggaraan” atau “sistem fungsional/ operasional” dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/ fungsional inilah, di bidang Sistem Peradilan Pidana (SPP) muncul istilah “*integrated criminal justice system*” atau “*the administration of criminal justice*”.

Apabila SPP dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” (“sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dan kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/ badan penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh badan/ aparat pelaksana/ eksekusi). Keempat tahap/ sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum integral, dan sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (“*Integreted Criminal Justice System*”). Patut dicatat, bahwa di dalam keempat sub-sistem

itu, tentunya termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum. Dengan demikian, dilihat dari aspek struktur yang integral, kuranglah tepat apabila dikatakan bahwa sistem pengadilan hanya merupakan “*system of court*” dan hanya merupakan sistem kekuasaan mengadili/ menyelesaikan perkara (*a mechanism of the resolution of dispute*). “Badan Pengadilan” dan “kekuasaan mengadili” hanya merupakan sub sistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, yakni di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti khususnya tindak pidana penyidikan yang dilakukan oleh anak.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*)

kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah penyidik kepolisian dan pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian;
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan membuat pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan,

motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara;

2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metodedeskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang

Anak merupakan generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, oleh karena itu anak peranannya dalam memajukan Bangsa dan Negara dikemudian hari sangatlah strategis namun juga sangatlah riskan jika di dalam perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tidak berjalan secara utuh, seimbang serta selaras dimana anak tersebut menjalankan kehidupannya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.

Hal ini yang menjadi dasar awal mengapa anak-anak harus dilindungi atau alasan perlindungan anak baik dari segi sosial maupun hukum yang berlaku, jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, karena perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu anak harus diperhatikan serta dididik sesuai dengan peranan mereka sebagai generasi penerus. Proses pendidikan anak dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formalnya anak dididik di sekolah dimana anak tersebut

menuntut ilmu, sedangkan informalnya anak tersebut mendapatkan pendidikan dirumah bersama keluarganya ataupun ditempat-tempat pendidikan yang bukan sekolah.

Setiap anak memang cenderung memiliki sifat jahil, iseng dan nakal terhadap keluarganya ataupun teman-temannya, yang memang hal tersebut adalah hal yang wajar didalam perkembangan anak. Masalah kemudian muncul ketika kenakalan anak tersebut menjadi berlebihan yang menjurus kearah tindak pidana yang secara tidak langsung dapat merusak moral anak tersebut dimasa yang akan datang.

Pada wilayah hukum polsek Ujung Pandang, sering sekali terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap rekan sebayanya. Meskipun pada awalnya tindakan itu adalah tindakan biasa yang bagi anak-anak merupakan tindakan main-main, namun tak sedikit juga orang tua yang keberatan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap anaknya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di dominasi oleh tindak pidana penganiayaan. Berikut data tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polsek ujung pandang.

TABEL
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG

No.	Tahun	Jumlah
1.	2012	14
2.	2013	17
3.	2014	12
4.	2015	20
5.	2016	15
Jumlah		78

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Dalam penelitian yang penulis lakukan, salah satu kendala penyidikan anak di Polsek Ujung Pandang, adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Pada tindak pidana yang korbannya adalah anak, maka penyidikannya langsung dilakukan oleh penyidik di Polrestabes. Tetapi jika pelakunya adalah anak, maka tetap dilaksanakan oleh polsek. Sementara di polsek sendiri, tidak ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada

pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Dalam penelitian yang saya lakukan pada tanggal 29 Oktober 2017, melalui wawancara dengan Sukarman selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Ujung Pandang Kota Makassar, dikemukakan bahwa:

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Kentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa

pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara

seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui

bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa atau TNI. Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

B. Kendala Yang Menghambat Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas

yang meliputi proses penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polsek Ujung Pandang. Hasil wawancara penulis Ismail Jaya selaku salah satu penyidik pembantu mengemukakan bahwa:

Dalam penelitian yang penulis lakukan, salah satu kendala penyidikan anak di Polsek Ujung Pandang, adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Pada tindak pidana yang korbannya adalah anak, maka penyidikannya langsung dilakukan oleh penyidik di Polrestabes. Tetapi jika pelakunya adalah anak, maka tetap dilaksanakan oleh polsek. Sementara di polsek sendiri, tidak ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara itu, dapat kita lihat bahwa secara sumber daya manusia, polsek Ujung Pandag belum dapat melakukan penyidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini dikarenakan belum ada penyidik yang memiliki kompetensi penyidikan anak.

Arham Gusdiar, selaku anggota POLRI pada Polsek Ujung pandang, mengemukakan bahwa:

Banyak orang tua korban tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui diversi. Alasan yang dikemukakan adalah keinginan untuk membuat pelaku kapok jika dimasukkan dalam penjara. Alasan lain adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat, penegak hukum kurang mendukung perdamaian. Selain itu, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian non-litigasi ini.

Apa yang dikemukakan Arham di atas memang benar adanya.

Hal inilah yang paling menghambat tugas kepolisian dalam melakukan diversi. Untuk itu, sistem diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Oleh karena itu, jika anaknya menjadi korban, harus legowo menerima cara-cara diversi, karena tidak menutup kemungkinan anak yang bersangkutan juga tersangkut dalam kasus tindak pidana.

Selanjutnya, Sukarman yang penulis wawancarai tanggal 30 Oktober 2017 menambahkan adanya kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan diversi anak, dikemukakan bahwa:

Permasalahan lain yang menjadi kendala utama dalam proses persidangan adalah kesiapan advokat yang benar-benar

memperjuangkan nasib anak-anak tidak ada di sini, kehadiran Pembimbing Kemasyarakata juga masih sulit.

Apa yang dikemukakan Sukarman di atas, memang sama dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini tidak hanya terjadi dipolsek Ujung Pandang saja, karena berdasarkan pengamatan penulis, hal serupa juga sangat sering dialami oleh Polsek-Polsek Lainnya di Kota Makassar. Kebanyak pengacara yang menangani perkara anak, khususnya bagi mereka yang kurang mampu adalah pengacara yang dibayar oleh negara, atau Prodeo. Hal ini menjadikan pemberian jasa bantuan hukum tidak optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saran Penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi.
- 2) Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran orang tua atau pihak korban terkait mengenai diversi, serta lemahnya bantuan hukum yang dilakukan pengacara dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversi.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah:

- 1) Perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di setiap polsek di Kota Makassar agar setiap perkara yang melibatkan anak nakal tidak terpusat pada Polrestabes saja, melainkan Polsek juga dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan diversi.
- 2) Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan diversi ini harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran terhadap advokat dan badan pemasyarakatan agar bertindak sepenuh hati dalam membantu kepolisian mengupayakan diversi pada perkara tindak pidana yang dilakukan anak nakal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan. Jakarta : Kencana.
- Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, cv. Novindo Pustaka Mandiri.
- Djoko Prakoso. 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartono, Kartini 1994. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru.
- Rusli Effendy, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung.